

DOMINASI MILITER DALAM POLITIK DAN PEMERINTAHAN DI MESIR: KEGAGALAN DEMOKRATISASI DI MESIR PADA KUDETA 2013

Afini Nurdina Utami & Syaiful Anam
Universitas Indonesia & Universitas Mataram
Email : afini.nurdina@alumni.ui.ac.id & s.anam@unram.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang bagaimana proses demokratisasi yang terjadi untuk pertama kalinya di Mesir yang ditandai dengan terpilihnya Presiden Mohammad Mursi serta kemenangan suara kelompok Islam di parlemen melalui pemilihan umum ini tidak dapat berlangsung dengan mulus. Militer yang telah lama berada di posisi penting di Mesir tidak tinggal diam. Proses demokrasi di Mesir dinodai dengan adanya kudeta yang dilakukan oleh kelompok militer terhadap pemerintahan Mursi pada tanggal 3 Juli 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan dari teori pretorian dan konsep intervensi militer dalam menganalisis dominasi militer sebagai aktor yang sangat dominan di Mesir. Metode penelitian yang digunakan adalah model kualitatif dengan metode kajian pustaka dari sumber-sumber yang valid. Hasil dari penelitian ini adalah kelompok militer yang sebelumnya beraliansi dengan kelompok Ikhwanul Muslimin dan mendukung terjadinya revolusi Mesir yang mengakibatkan lengsernya Presiden Mubarak, berbalik menjadi lawan saat IM memenangkan posisi mayoritas pada pemilihan parlemen Mesir. Militer melihat bahwa suara kelompok Islam tidak lagi sejalan dengan kepentingannya sehingga kudeta pada 2013 atas Muhammad Mursi pun terjadi. Peristiwa tersebut menunjukkan kekuatan civil society Mesir kalah dengan dominasi militer dalam perpolitikan Mesir.

Kata kunci: *Mohammad Mursi, Kudeta Militer, Mesir, Demokratisasi*

ABSTRACT

This paper discusses how the democratization process that took place for the first time in Egypt, which was marked by the election of President Mohammad Morsi and the victory of Islamic groups' votes in parliament through this general election, did not run smoothly. The military, which has long been in an important position in Egypt, is not standing still. The democratic process in Egypt was marred by the coup carried out by the military group against the Morsi government on July 3, 2013. Through an analysis based on pretorian theory and the concept of military intervention in politics, this paper shows the dominance of the military as a very dominant actor in Egypt. Pretorian theory, in particular, emphasizes the dominant role of the military in all important political institutions, including political leaders. The military, which was previously allied with the Muslim Brotherhood and supported the Egyptian revolution that resulted in the ouster of President Mubarak, turned into an opponent when IM won a majority in the Egyptian parliamentary elections. The military saw that the voice of Islamic groups was no longer in line with its interests, so the 2013 coup against Muhammad Morsi took place.

Keywords: *Mohammad Mursi, Military Overthrow, Egypt, Democratization*

PENDAHULUAN

Angin segar demokrasi bertiup kepada Mesir pada saat terpilihnya Muhammad Mursi, seorang tokoh Ikhwanul Muslimin non-militer sebagai presiden Mesir. Pertama kalinya dalam sejarah, Mesir dipimpin oleh presiden yang bebas dari latar belakang militer setelah resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Mesir pada 24 Juni 2012. Setelah tumbangnya Presiden Husni Mubarak pada 2011, desakan nasional dan internasional akan pentingnya demokrasi di Mesir memaksa militer memberikan peluang kepada elit sipil untuk

meraih kekuasaan pemilu (Basyar, 2020). Selama ini, Mesir selalu dipimpin oleh presiden yang berasal dari kelompok militer, tepatnya sejak kudeta yang dilakukan oleh kelompok militer pada masa Raja Farouq pada 1952.

Pemilihan umum Mesir pun dilakukan dua tahap dan keduanya dimenangkan oleh suara kelompok Islam. Pemilu parlemen Mesir yang lebih dahulu diadakan sebelum pemilihan presiden dimenangkan oleh Partai Kebebasan dan Keadilan yang juga berafiliasi kepada kelompok Ikhwanul Muslimin. Kemenangan kekuatan Islam baik dalam pemilihan parlemen maupun pemilihan presiden ini cukup membuat kaget kelompok elit Mesir yang mayoritas cenderung mengarah pada ideologi liberal dan sekuler.

Patut untuk disayangkan, proses demokratisasi tersebut tidak berlangsung lama. Pada 2013, Presiden Mursi di kudeta oleh militer. Ia dan seluruh kabinetnya ditangkap dan menjadi tahanan negara. Hal ini disebabkan karena Mursi dianggap ‘telah gagal untuk memenuhi permintaan masyarakat Mesir’ (BBC, 2013). Kudeta oleh militer atas demokrasi ini dapat terjadi disebabkan karena posisi militer dalam pemerintahan Mesir, terutama kalangan elitnya yang memiliki kedudukan tinggi dan kuat dalam politik dan pemerintahan Mesir. Sebelum kudeta Mursi oleh militer, peristiwa kudeta terhadap Mubarak atau juga yang dikenal sebagai Revolusi Mesir 2011 ini dapat dikatakan cukup mengejutkan sebelumnya. Hanya dalam kurun waktu 18 hari, kekuatan massa di Mesir dapat menggulingkan rezim otoriter yang telah berkuasa cukup lama. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa masyarakat sipil (*civil society*) di Mesir ini cukup kuat. Akan tetapi, hal yang menarik untuk disorot adalah posisi militer, karena walaupun kudeta terhadap Mubarak yang berasal dari militer dan Mursi dari sipil terjadi, posisi elit militer tetap berada di posisi yang kokoh dan tak tergantikan.

Hal yang menonjol dalam proses demokratisasi di Mesir ini adalah meskipun negara sekitarnya yang juga mengalami hal serupa yang disebabkan oleh peristiwa Arab Spring dan menunjukkan kekuatan dari *civil society* di masing-masing negara, Mesir juga menunjukkan kekuatan *civil society* yang cukup kuat, namun masih kalah dengan kekuatan militer Mesir yang jauh lebih kuat dalam kehidupan politik di Mesir.

KERANGKA ANALISIS

Konsep Pretorianisme

Di dalam sebuah negara, militer memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan dan keamanan suatu negara berdaulat. Menurut Perlmutter (Fadilah, 2020) terdapat tiga jenis organisasi militer yang ada pada masa modern ini, yaitu prajurit profesional, prajurit pretorian, dan prajurit revolusioner. Prajurit profesional biasanya ditemukan di negara-negara maju yang bercirikan institusi profesional, memiliki semangat militer, korporatisme dan bertanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Prajurit revolusioner lebih sebagai alat revolusi dan cenderung takluk dibawah politik.

Prajurit pretorian adalah tipe militer yang memandang bahwa militer dapat bertindak sebagai sebuah landasan politik, dimana ketika jabatan seorang perwira semakin tinggi, maka jabatan tersebut semakin politis. El-Shimy menjelaskan definisi yang lebih tepat yaitu prajurit pretorian adalah aktor politik utama yang akan berusaha untuk mengelola, menumbangkan dan sepenuhnya mengontrol transisi politik untuk memastikan warga sipil tidak benar-benar memerintah (El-Shimmy, 2016). Negara dengan tentara pretorian berbeda dengan pemerintahan yang dipimpin oleh militer. Pemerintahan yang dipimpin oleh militer biasanya kesempatannya untuk menjalankan pemerintahannya relatif lebih singkat hanya dalam masa transisi, sedangkan tentara pretorian dapat bertahan lebih lama dalam mengontrol pemerintahan seperti dalam kasus Aljazair, Mesir, Indonesia, Turki dan Pakistan (El-Shimmy, 2016).

Konsep Intervensi Militer dan Politik

Keterlibatan militer dalam politik sebetulnya sangat umum terjadi baik di negara demokratis maupun totalitarian. Fungsi militer sebagai garda nasional, pelindung negara, membuat posisi militer menjadi sangat kuat dan memiliki pengaruh terhadap pemerintahan. Dalam penjelasan tentang intervensi militer, singkatnya dapat dipahami sebagai sebuah kondisi ketika militer masuk, berpartisipasi, mempengaruhi kebijakan politik secara langsung maupun tidak langsung.

Intervensi militer ini dapat dilihat dari dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

a. Faktor eksternal (Menurut Amos Perlmutter)

Faktor eksternal dari intervensi militer dapat disebabkan oleh : (a) kondisi sosial, yaitu ketika kondisi sosial yang lemah terjadi di suatu negara, maka kepentingan kelompok yang muncul akan semakin banyak sehingga

militer perlu turun tangan untuk melakukan intervensi. dan politik dalam suatu negara. (b) Kondisi politik yang disebabkan oleh persoalan-persoalan sipil yang mengharuskan militer untuk intervensi, yaitu ketika struktur politik sipil terfragmentasi dalam faksi-faksi politik dan perangkat konstitusi tidak berjalan (Perlmutter, 2000).

b. Faktor internal

S. E. Finer menjelaskan bahwa:

“... lebih melihat internal militer sebagai faktor utama terjadinya intervensi. Faktor motivasi biasanya sangat berpengaruh besar apakah militer akan mengintervensi atau tidak. Faktor ini mencakup beberapa motivasi antara lain; motivasi sebagai tujuan akhir tentara, dorongan dari kepentingan nasional, kepentingan kelompok yang meliputi kepentingan kelas, kepentingan regional, kepentingan korps, dan kepentingan individu.” (Finer, 2002)

Dari pendapat Perlmutter dan Finer tersebut maka terdapat dua faktor yang dapat kita gunakan untuk melihat alasan dan latarbelakang apa yang menyebabkan militer melakukan intervensi atas politik pemerintahan negara yang datang dari pengaruh internal dan eksternal.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan penulis yaitu sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan artikel media massa yang memiliki kesesuaian tema dengan penelitian. Objek penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai fenomena kudeta dan intervensi militer yang terjadi di Mesir pada tahun 2013 dimana menodai proses demokratisasi yang sedang dilakukan saat itu. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah teknik telaah pustaka atau *library research*. Teknik ini merupakan pengumpulan data yang menggunakan buku, jurnal, website resmi, artikel media massa yang kredibel dan berkaitan dengan tema penelitian yang diangkat.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data proses analisis yang digunakan untuk mengklasifikasikan serta memperjelas penelitian terhadap hal-hal yang dianggap penting oleh penulis. Kemudian penyajian data dengan penulisan teks yang bersifat naratif kemudian teknik analisis data yang ketiga ialah dengan verifikasi data dengan cara mengumpulkan, menelaah, serta menyimpulkan data dari berbagai sumber penelitian yang sudah valid sehingga menjadi kesimpulan yang kredibel.

Dalam proses penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari sumber-sumber terkait kemudian menganalisis fenomena yang terjadi dengan pendekatan-pendekatan yang dapat menjelaskan situasi politik di Mesir yang berhasil memunculkan pola baru dengan terpilihnya presiden yang bukan dari kalangan militer namun tidak bertahan lama dan kembali digantikan dengan dominasi militer di bab pembahasan.

PEMBAHASAN

Militer dalam Pemerintahan Mesir

Proses militerisasi dari pemerintahan dan ekonomi Mesir dimulai sekitar 7 dekade yang lalu. Kudeta terhadap Raja Farouq yang dipimpin oleh sekelompok tentara muda resmi mengakhiri era kepemimpinan monarki di negara tersebut. Kudeta ini sekaligus menempatkan Mohammad Naguib sebagai presiden dari kalangan militer yang pertama. Jabatan Presiden kemudian dilanjutkan oleh Gamal Abdel Nasser, dan selama masa kekuasaannya (1954-1970), Nasser membentuk rezim Arab Sosialis dimana perwira militer menempati posisi paling penting dalam pemerintahan dan ekonomi (Abul-Magd, *The Egyptian Military In Politics And The Economy: Recent History And Current Transitions Status*, 2013). Dari sinilah keterlibatan militer dalam pemerintahan hingga ekonomi Mesir dimulai.

Setelah Nasser, dua presiden pada pemerintahan berikutnya, yaitu Anwar Sadat yang menjabat sejak 1970 hingga 1981 dan Hosni Mubarak yang menjabat sejak 1981 hingga 2011, juga merupakan presiden dari kalangan militer. Anwar sadat membawa kebijakan liberalisasi di Mesir salah satunya dengan memberlakukan *Infitah (Open Door Policy)*. Dalam aspek militer, Sadat melakukan upaya pengurangan jumlah personil militer yang berada dalam posisi pemerintahan atau demiliterisasi. Pada periode awal 1960 dan akhir 1970, keberadaan militer dalam kabinet berada pada kisaran menengah. Pada periode Sadat, di dalam Kabinet Januari 1972, militer dalam kabinet tersebut berkurang jumlahnya pada tingkat dibawah kabinet-kabinet sebelumnya sejak 1952 dan terus berkurang secara signifikan (Cooper, 1982). Pada akhir periode, militer dibatasi dan hanya boleh terlibat dalam urusan logistik (maritim, komunikasi dan transportasi) dan murni militer (perang dan produksi alat perang) (Cooper, 1982).

Pengurangan jumlah militer dalam pemerintahan ini disebut oleh Cooper sebagai proses reformasi dan liberalisasi yang sukses. Akan tetapi, meskipun posisi militer telah dikurangi secara signifikan, keberlanjutan dari dominasi politik dalam pemerintahan Mesir agaknya masih belum selesai. Hal tersebut ditunjukkan dengan terpilihnya wakil presiden

dari kalangan militer, Hosni Mubarak. Mubarak adalah Jenderal Angkatan Udara yang mendapat banyak perhatian setelah keterlibatannya dalam Perang Oktober 1973 (Yom Kippur). Kedudukan wakil presiden tidak berperan begitu *powerful*, namun dipilihnya wakil presiden yang berasal dari militer ini menunjukkan adanya keberlanjutan dalam posisi penting militer dalam politik Mesir.

Peristiwa penembakan yang menewaskan Anwar Sadat sekaligus mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden pada 1981. Wakil Presiden Mesir saat itu, Hosni Mubarak kemudian naik menggantikan posisi Sadat dan membawa Mesir ke arah politik yang berbeda. Sebelumnya, Nasser berpendapat bahwa pemerintahan militer tidak begitu baik, akan tetapi lebih baik daripada pemerintahan lainnya termasuk demokrasi. Sedangkan bagi Sadat, ia dengan jelas lebih menginginkan negara yang lebih demokratis bagi Mesir (Kosak C. , 2016). Mubarak yang menganut Nasserisme akhirnya membawa Mesir menjadi negara yang tidak demokratis dan dari segi ekonomi, Mesir terbelenggu dalam kapitalisme dan korupsi.

Mubarak mengembalikan pengaruh militer pada kehidupan masyarakat Mesir, dimana para elit militer diperbolehkan untuk terlibat dalam ekonomi dengan membuat perusahaan dan diperbolehkan untuk menduduki posisi tinggi dalam pemerintahan (Abul-Magd, *The Egyptian Military In Politics And The Economy: Recent History And Current Transitions Status*, 2013). Bagi masyarakat sipil, Mubarak melakukan pembatasan kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul (International, 2020). Husni Mubarak bertahan selama hampir 30 tahun lalu kemudian tumbang oleh kekuatan sipil yang lelah dengan segala bentuk kebijakan yang menyengsarakan rakyat.

Kekuatan Militer dalam Politik dan Ekonomi di Mesir

Diantara dua Perang Dunia, yaitu tahun 1914 dan 1940-an, militer Mesir dapat dikatakan sebagai sebuah institusi yang lemah dan yang tidak memiliki peran yang signifikan di Mesir (Kordunsky & Lokesson, 2013). Abad sebelumnya, pada 1881, terdapat sebuah peristiwa dimana Kolonel Ahmad Urabi dan tentara lainnya melakukan sebuah kudeta terhadap pemerintahan pada masa itu. Kudeta dilakukan untuk mewakili penduduk asli Mesir yang ingin melawan dominasi elit Turki dan dominasi ekonomi dari asing. Peristiwa ini kemudian menjadi sebuah dongeng di negara Mesir tentang suatu kudeta mulia yang memperjuangkan tujuan nasionalis.

Pada tahun 1952, ketika presiden Mesir, Gamal Abdul Nasser berhasil memimpin kudeta, ia mengangkat kembali narasi tentang ‘pahlawan nasional berseragam’ dan memperkenalkan kembali kepada kalangan kelas bawah untuk menumbuhkan citra baik di publik tentang ‘kudeta mulia’, (Abul-Magd, 2012) serta tentunya citra baik tentang militer. Kehadiran Israel di Timur Tengah pada 1948 menjadi momentum untuk militer Mesir dalam mendorong koalisi Arab untuk mendukung Palestina. Kalah-menang pun pernah dialami oleh militer Mesir. Yang pasti adalah reputasi mereka semakin meningkat di mata masyarakat sebagai pembela kepentingan negara.

Hingga saat ini, militer Mesir memegang kuasa di Mesir. Setelah Revolusi 2011, militer Mesir memegang kendali dalam pemerintahan di Mesir melalui *Supreme Council of Armed Forces* (SCAF). Pada saat terpilihnya Presiden Mursi, SCAF pula yang menyerahkan pemerintahan Mesir kepada Muhammad Mursi. Ketika Mursi dirasa gagal dalam menjalankan amanah pemerintahan, SCAF pula yang memberikan ultimatum kepada Mursi dan melakukan kudeta terhadap pemerintahan sah tersebut. Setelah militer kembali menguasai politik Mesir, partisipasi masyarakat dalam pemilu diatur sesuai kepentingan militer (Basyar, 2020).

Dari segi ekonomi, para elit militer Mesir meluncurkan sebuah badan ekonomi yang disebut *National Services Projects Organization* (NSPO) yang didirikan pada 1979. Badan ini mendirikan berbagai macam perusahaan komersil yang dijalankan oleh para mantan perwira tinggi militer. Tujuannya untuk menciptakan berbagai industri yang memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir, menawarkan produk perusahaan dengan harga terjangkau di pasar domestic dan membuka kesempatan kerja (NSPO, 2017). Industri-industri utama yang menyediakan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan, hingga penerbangan dan keamanan semuanya dimiliki oleh NSPO. Oleh sebab itu, kekuatan militer dalam sektor ekonomi di Mesir tidak dapat diragukan lagi. Kekuasaan dalam politik dan ekonomi merupakan dasar dari kekuatan militer di Mesir.

Kekuatan Masyarakat Sipil di Mesir: Ikhwanul Muslimin (IM)

Rezim Mubarak memberikan kebijakan yang represif terhadap masyarakat media massa, dan kelompok masyarakat. Pembatasan tersebut tidak menghentikan masyarakat sipil untuk terus mencari cara untuk mengekspresikan pandangan politiknya. Ketika tidak ada sarana yang memungkinkan, maka masyarakat menggunakan masjid, gereja, dan sindikat profesional sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi politik (Al-Jazeera, 2012).

Perjalanan kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir tidak berjalan mulus. Meskipun bergabung dalam perjuangan militer dan mendukung kudeta raja Farouq pada 1952, pasca mendapat kekuasaan, militer maju sebagai pemimpin Mesir sedangkan IM justru banyak yang dipenjara sebagai akibat dari agenda sekuler yang dibawa oleh Gamal Abdul Nasser. Untuk memenangkan kembali dukungan masyarakat, presiden Anwar Sadat yang menggantikan Nasser membebaskan tahanan yang merupakan anggota dari partai yang berafiliasi pada IM. Presiden selanjutnya, Hosni Mubarak tidak menyembunyikan ketidakpercayaannya terhadap IM dan bahkan mengubah konstitusi untuk melarang pembentukan partai politik (Nasser, 2014). Berbagai halangan dan tantangan dari pemerintah membuat IM terus bekerja di bawah tanah dan terus mencari cara untuk mengalahkan tindakan pemerintah tersebut. Menjadi target pemerintah tidak menyurutkan dukungan yang mengalir bagi IM di Mesir. Sudah puluhan tahun lamanya kelompok IM tidak menjalani kebebasan dalam berpartisipasi dalam politik di Mesir. Banyak dari tokoh IM ditangkap, dipenjara maupun diasingkan oleh pemerintah.

Kebangkitan IM melalui momentum revolusi 2011 sampai dengan diangkatnya tokoh senior IM sebagai Presiden, Muhammad Mursi, mengkhawatirkan bagi kalangan militer. Selama ini, IM banyak dibatasi ruang geraknya untuk mengekspresikan pandangan politiknya ataupun masuk ke dalam pemerintahan. Momentum bangkitnya IM ini, serta upaya Mursi untuk memegang kekuasaan yang besar sebagai seorang presiden Mesir membuat militer tidak bisa tinggal diam sebagai pengamat saja.

SCAF, Ikhwanul Muslimin, dan Kudeta 2013

Setelah Revolusi 2011, kekuasaan sementara dipegang oleh Mesir. Langkah pertama yang dilakukan SCAF untuk mencapai agendanya dimanifestasikan dalam konstitusi dan pengaturan hukum yang diterapkan pada periode transisi. Pada mulanya, di periode awal masa transisi, SCAF dan IM menjalin aliansi dengan tujuan untuk menekan pertumbuhan gerakan liberal, walaupun masing-masing memiliki alasan yang berbeda. Akan tetapi, aliansi ini kemudian terpecah pada awal 2012 disebabkan oleh kecurigaan yang muncul pada tujuan akhir masing-masing kelompok untuk meningkatkan kontrol masing-masing atas negara Mesir. Keretakan hubungan SCAF dan IM semakin tampak ketika pemilu parlemen yang dimenangkan oleh suara IM dan aliansi Islamnya (Selim, 2015).

SCAF tidak tinggal diam atas kemenangan kelompok IM di parlemen pada 14 Juni 2012. Kontestasi yang seharusnya usai setelah pemilu ini tidak selesai begitu saja. Keputusan

dari Mahkamah Konstitusi Mesir menyatakan bahwa UU pemilu yang memperbolehkan partai politik dapat mencalonkan anggotanya lewat jalur independen dianggap inkonstitusional (Basyar, 2020). Hasil pemilu yang dimenangkan IM pun menjadi tidak sah dan harus dibubarkan. Dalam hal ini dapat terlihat agenda SCAF yang tidak rela dengan kemenangan IM yang dirasa akan berlawanan dengan kepentingannya. Tiga hari kemudian, pada 17 Juni 2012, kekuasaan legislatif diberikan kepada SCAF untuk mengisi kekosongan legislatif yang kosong setelah parlemen yang dimenangkan suara aliansi Islam dibubarkan. Momentum ini digunakan oleh SCAF untuk membentuk Dewan Konstituan sesuai dengan kepentingan mereka (Basyar, 2020).

Presiden Mursi yang dilantik pada 30 Juni mencoba menyelamatkan parlemen yang dilumpuhkan tersebut. Akan tetapi upaya ini dihalau oleh Mahkamah Konstitusi. Dua tahun kurang pemerintahan Mursi ini dijalani dengan sangat berat oleh Mursi. Dari aspek politik, kubu oposisi tidak membiarkan pemerintahan berjalan dengan tenang. Ekonomi Mesir yang memburuk memperparah kondisi yang ada. Protes dari masyarakat yang kontra dengan pemerintahan Mursi juga terus disuarakan. Militer yang seharusnya mengawal jalannya demokrasi justru memberikan ultimatum kepada Presiden untuk mencari solusi atas kondisi negara, mengancam untuk mengambil alih pemerintahan, kemudian berujung pada kudeta militer dan penahanan Presiden Mursi. Dengan ditahannya presiden yang dipilih secara demokratis tersebut, usai sudah perjalanan singkat demokratisasi di Mesir.

Menurut teori pretorian, apa yang terjadi di Mesir ini merupakan contoh yang paling tepat untuk teori ini, terutama dalam melihat hubungan antara sipil dan militer di Mesir saat ini. Sangat jelas terlihat dominasi militer sebagai aktor yang sangat dominan di Mesir. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa teori pretorian menekankan peran yang dominan dari militer didalam semua institusi yang penting dalam politik, termasuk pemimpin politik. Pemimpin politik mengharuskan pemimpin dari kalangan militer atau dari kelompok yang dekat dengan militer (Kosak C. , 2016). Gelombang Arab Spring mengembalikan eksistensi dari kelompok IM yang selama ini diatur, ditekan maupun didukung di berbagai negara. Kebangkitan IM di tanah kelahirannya pada momentum revolusi 2011 rupanya tidak seberuntung kelompok IM di tempat lainnya. Kekuatan sipil dipertemukan dengan kekuatan militer Mesir yang kuat, dimana kelompok oposisi manapun, terlebih yang berlawanan dan mengancam posisi militer maka akan disingkirkan. Presiden seperti Hosni Mubarak maupun Mohammad Mursi dapat datang dan pergi dalam politik Mesir. Yang pasti tetap kuat adalah posisi militer. Maka dari kerangka tersebut dapat kita memahami mengapa militer dapat

dengan mudah melepaskan Mubarak, kemudian mengadakan pemilihan langsung, lalu mengizinkan IM untuk memerintah dan akhirnya dengan ancaman (kekerasan) mengakhiri kekuasaannya di Mesir dalam periode yang singkat.

KESIMPULAN

Masa singkat tegaknya demokrasi di Mesir terjadi pada saat terpilihnya Muhammad Mursi, seorang tokoh Ikhwanul Muslimin non-militer sebagai presiden Mesir pada 2012 setelah revolusi yang terjadi pada 2011. Patut disayangkan, proses tersebut dinodai oleh kudeta atas Mursi oleh militer. Militer Mesir memang telah lama duduk di posisi yang nyaman dalam politik dan pemerintahan di Mesir, bahkan menguasai politik dan ekonominya. Fenomena ini sangat jelas memperlihatkan dominasi militer sebagai aktor yang sangat dominan di Mesir didalam semua institusi yang penting dalam politik, termasuk pemimpin politik. Militer yang sebelumnya beraliansi dengan kelompok Ikhwanul Muslimin dan mendukung terjadinya revolusi Mesir yang mengakibatkan lengsernya Presiden Mubarak, berbalik menjadi lawan saat IM memenangkan posisi mayoritas pada pemilihan parlemen Mesir. Presiden Mursi kemudian lengser dan hingga saat ini, pemimpin negara di Mesir kembali dipegang oleh Militer. Peristiwa tersebut menunjukkan kekuatan dari akar rumput yang berasal dari masyarakat masih kalah dengan kekuatan militer dalam kehidupan perpolitikan di Mesir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul-Magd, Z. (2012). Understanding SCAF. *The Cairo Review of Global Affairs*.
- Abul-Magd, Z. (2013). The Egyptian Military In Politics And The Economy: Recent History And Current Transitions Status. *CMI Insight*.
- Al-Jazeera. (2012, 5 24). *The Brotherhood and Mubarak*. Retrieved from Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/program/al-jazeera-world/2012/5/24/the-brotherhood-and-mubarak>
- Basyar, M. d. (2020). *Many Faces of Political Islam in the Middle East: Arah Baru Gerakan Politik Islam Pasca-Arab Spring*. Jakarta: LIPI Press.
- BBC. (2013, July 4). "Egypt's crisis: Army ousts President Mohammed Morsi.". Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-23173794>
- Cooper, M. N. (1982). The Demilitarization of the Egyptian Cabinet. *International Journal of Middle East Studies*.
- El-Shimmy, Y. (2016). *A Model of Praetorian States*. Cambridge: Middle East Initiative Working Paper: Harvard Kennedy School.

- Fadilah, F. N. (2020). “*Tipe-Tipe Prajurit dan Militer Modern Menurut Perlmutter*”. Retrieved from InMind Institute: <https://inmind.id/tipe-tipe-prajurit-dan-militer-modern-menurut-perlmutter/>
- Finer, S. E. (2002). *The Man on Horseback, The Role of Military in Politics*. Colorado: Westview Press.
- International, A. (2020, February 25). *Hosni Mubarak: A Living Legacy of Mass Torture and Arbitrary Detention*. Retrieved from Amnesty International: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/hosni-mubarak-legacy-of-mass-torture/>
- Kordunsky, A., & Lokesson, M. (2013). *The Egyptian Military’s Huge Historical Role*. Retrieved from National Geographic: <https://www.nationalgeographic.com/history/article/130705-egypt-morsi-government-overthrow-military-revolution-independence-history>
- Kosak, C. (2016). *How Does The Military Dominate Politics In Egypt?* Istanbul: Istanbul Sehir University.
- Kosak, C. (2016). *How Does The Military Dominate Politics In Egypt?* Istanbul: Istanbul Sehir University.
- Nasser, H.-M. (2014). “*Not By Accident, How Egyptian Society Successfully Launched a Revolution*”. New York: The City University of New York.
- NSPO. (2017). *NSPO: Goals, history and achievements*. Retrieved from NSPO: <http://www.nspo.com.eg/nspo/about.html>
- Perlmutter, A. (2000). *(Terj. Sahat Simamora) Militer dan Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Selim, M. G. (2015). Egypt Under SCAF and the Muslim Brotherhood: The Triangle of Counter Revolution. *Arab Studies Quarterly*.